



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 26 Agustus 2021.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan RKA K/L TA 2022
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **“Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2022”** disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN 2022
1.	Sekretariat Jenderal	Rp 386.865.071.000,-
2.	Inspektorat Jenderal	Rp 36.926.464.000,-
3.	Pemberdayaan Sosial	Rp 413.885.279.000,-
4.	Rehabilitasi Sosial	Rp 1.097.194.258.000,-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 30.606.642.086.000,-
6.	Penanganan Fakir Miskin	Rp 45.408.970.696.000,-
7.	Badiklit Pensos	Rp 305.843.267.000,-
	TOTAL	Rp 78.256.327.121.000,-

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon I Kementerian Sosial RI.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan pagu anggaran tambahan untuk:
 - a. Kartu Sembako/BPNT untuk 5,9juta KPM selama 12 bulan dengan indeks @Rp200.000/bulan sebesar Rp14.160.000.000.000,- (*Empat Belas Triliun Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah*)
 - b. Program Atensi Anak untuk anak yatim selama 12 bulan sebesar Rp11.292.228.000.000,- (*Sebelas Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta rincian dari usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 ini untuk dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Sosial RI.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mendukung pengalihan dana dekonsentrasi Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022 untuk mendukung program prioritas Tahun 2022.

- b. Meningkatkan Program Tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak Covid-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat.
- c. Penyaluran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.48 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, SPt.